

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lombok merupakan salah satu pulau di Indonesia yang menjadi destinasi wisata. Daya tarik wisata yang dimiliki merupakan daya tarik wisata alam dan budaya. Kondisi daya tarik wisata alam terdiri dari panorama alam, hutan lindung dan hutan kemasyarakatan, gunung dan bukit, sungai, lembah, pantai yang memiliki pasir putih, persawahan yang hijau, dan keanekaragaman potensi bahari. Pariwisata budaya mengalami perkembangan yang positif. Keselarasan antara budaya masyarakat sasak dengan budaya masyarakat Hindu terjalin dengan baik, sehingga menambah daya tarik wisata di Pulau Lombok dan menarik wisatawan ke Pulau Lombok (Jumail, 2011:8).

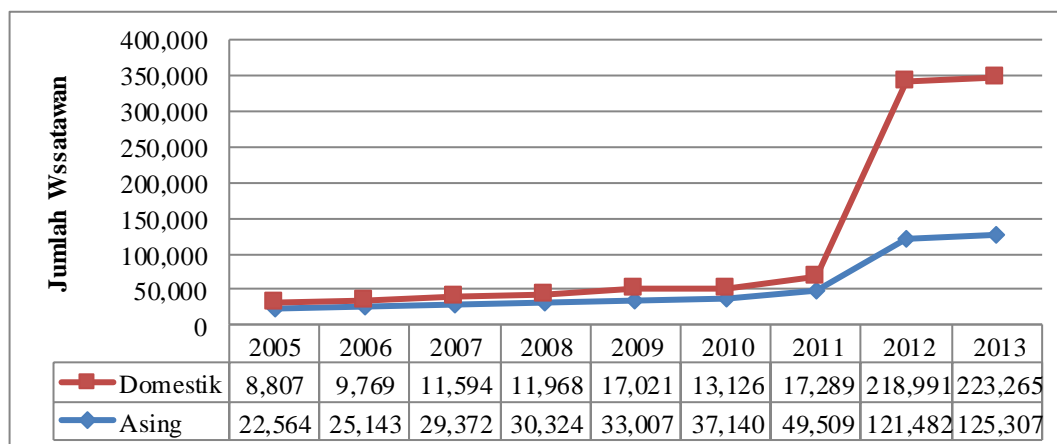
Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi pariwisata baik potensi alam dan budaya. Pengembangan pariwisata Lombok Tengah bersifat tradisional. Konsep pengembangan yang dilakukan tidak melihat pengaruh di masa yang akan datang. Banyak hotel dan restoran yang dibangun di kawasan hijau. Pembangunan daya tarik wisata di Lombok Tengah belum bertumpu pada konsep-konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan penanggung jawab pembangunan pariwisata memberikan izin kepada para investor asing sehingga pariwisata Lombok Tengah dikuasai oleh investor asing (Irianto, 2011:189).

Sejalan dengan dinamika, gerak perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti, *sustainable tourism development*, *rural tourism*, *ecotourism*, merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata (Suwena, 2010:34). Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.

Data menunjukkan dari tahun 2005 hingga tahun 2013, tercatat setidaknya 437.838 wisatawan domestik dan 531.830 wisatawan mancanegara yang telah mengunjungi berbagai objek wisata yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, sebaran data yang disajikan pada diagram di bawah memperlihatkan bahwa lonjakan tertinggi kedatangan wisatawan terjadi pada tahun 2012 sejumlah 218.991 wisatawan domestik, naik hingga lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal sama yang juga terjadi pada wisatawan mancanegara dengan kunjungan sejumlah 121.482 wisatawan mancanegara, meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun

sebelumnya. Gambaran lebih lengkap terkait jumlah kunjungan wisatawan tersebut akan disajikan pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1: Angka Kunjungan Wisatawan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2005-2013



Sumber: Berdasarkan Buku Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2011, 2013, dan 2014.

Dengan berbagai perkembangan yang telah dicapai, masih terdapat sebuah masalah yang belum banyak disadari terutama oleh pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas pengelolaan sektor pariwisata. Meskipun telah melakukan klasifikasi terhadap beberapa sektor pariwisata, namun luasnya cakupan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah menyebabkan perhatian pemerintah menjadi terpecah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah setidaknya membagi sektor wisata menjadi tujuh objek utama, yang selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. Di satu sisi pemerintah memberikan perhatian sangat besar bagi beberapa sektor pariwisata (wisata bahari khususnya), dengan mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan. Namun di sisi lain pemerintah juga seakan luput dalam memberikan perhatiannya pada sektor wisata lain yang jika diukur berdasarkan potensinya tak kalah dengan wisata bahari. Hasilnya muncul ketimpangan yang berdampak pada tidak “ter-ekspose-nya” potensi sektor wisata lain.

Tabel 1.1: Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Lombok Tengah

No.	Objek Wisata	Jenis	Lokasi
1.	Wisata Bahari	Pantai Awang, Bumbang, Gerupuk, Kawasan Pantai Putri Mandalika, Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok & Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang-Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur.	<ul style="list-style-type: none"> • Serenting • Kuta • Kecamatan Pujut • Kecamatan Praya Barat • Kecamatan Praya Barat Daya
2.	Wisata Alam	Pemandian dan pemandangan alam, air terjun, dan treking	<ul style="list-style-type: none"> • Aik Bukak, Aik Berik, Kec. Batukliang • Bumbang Kecamatan Pujut
3.	Wisata Budaya	Bau Nyale	• Kuta
		Nyongkolan	• Semua kecamatan
		Nede, Ngerantok	• Praya Timur, Janapria
		Perang Timbun	• Serewe Pejanggik
		Dusun tradisional	• Sade
		Praje/ Jaran Kamput	• Semua kecamatan
4.	Wisata Seni	Oncer	• Teruwai Pujut
		Rudat	• Perina jonggat
		Tawaq-Tawaq	• Batukliang
		Gendang Beleq	• Semua kecamatan
		Wayang Kulit	• Janapria, Prabarda, Praya Timur, BKU
		Amaq Abir	• Praya Timur
		Gandrung	• Marong, Praya Timur • Bagu Pringarata
		Cilokaq	• Semua kecamatan
		Kasidah	• Semua kecamatan
		Pepaosan	• Pujut, Jonggat, Prabar
		Teater Matahari	• Kopang
		Perisaian	• Semua Kecamatan
5.	Wisata Religi	Makam ketaq, makam nyatoq, makam serewe, makam biletawah, masjid kuno rembitan, masjid gunung pujut	• Kopang, Praya Tengah, Janapria, Pujut
6.	Wisata IPTEK	Batu Rijang	• Praya Barat
7.	Wisata Industri	Tenun Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Sukarara, Jonggat • Sade Pujut • Pejanggik Praya
		Kerajinan Rotan	• Beleka, Praya Timur
		Kerajinan Bambu	• Janapria, Praya Timur
		Gerabah	• Penujan, Praya Barat

Sumber: Lombok Tengah Dalam Angka tahun 2014

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 371 disebutkan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa dan desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai desa. Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 19 yaitu meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemprov, atau Pemda, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemprov, atau Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dikembangkannya pembangunan desa wisata akan terjadi arus urbanisasi ke ruralisasi (orang-orang kota senang akan pergi ke desa untuk berekreasi). Sekarang pintu telah terbuka bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi membangun daerahnya sendiri. Daerah dapat membuka investasi dan melakukan promosi terhadap daerah lain, dimana industrialisasi pariwisata menjadi sebuah kemestian. Industrialisasi tidaklah selamanya berarti modernisasi, karena pariwisata mempunyai kekhasan berupa penekanan penonjolan orisinalitas potensi wisata sebagai daya tarik yang tidak dapat dijumpai di daerah lain. Luasnya skala pengaruh sektor pariwisata memerlukan strategi yang mantap dalam pengelolaannya, seperti penyediaan fasilitas pelayanan dan penanganan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat (Syari, 2014:1).

Dalam pengembangan pariwisata, khususnya desa wisata dibutuhkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa di desa wisata tersebut. Terkait dengan peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata telah diteliti oleh Amrulloh (2014) menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan Dusun Sade sehingga menjadi destinasi wisata utama di Kabupaten Lombok Tengah tidak lepas dari peran aktif

masyarakat desa. Dusun Sade mengembangkan metode pariwisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh desa tersebut. Berbeda halnya dengan kawasan wisata lain, masyarakat Dusun Sade tidak menggantungkan dirinya pada pemerintah daerah baik untuk promosi maupun pengelolaan desa wisata. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah sangat kurang sehingga masyarakat Sade mengembangkan Dusun Sade secara mandiri sebagai desa wisata. Kelemahan penelitian tersebut adalah hanya meneliti peran masyarakat di Dusun Sade tanpa meneliti peran dari pemerintah daerah setempat. Oleh karenanya maka penelitian ini justru meneliti peran pemerintah daerah sebagai suatu penelitian yang menindaklanjuti penelitian Amrulloh (2014), khususnya peran dari pemerintah Desa Rembitan Dusun Sade.

Dusun Sade adalah salah satu dusun dengan berbagai macam potensi yang dimiliki dan menjadi satu-satunya destinasi desa wisata. Dusun yang telah didatangi oleh wisatawan sejak tahun 1975, jauh sebelum Pulau Lombok menjadi destinasi wisata populer di tengah wisatawan. Bahkan dengan berbagai potensi dan keunikannya, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan pengakuan dan menetapkan Dusun Sade menjadi desa wisata pada tahun 1989 melalui SK Gubernur NTB No. 2 Tahun 1989 dan Perda NTB No. 7/2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2013-2028. Hal tersebut didasarkan atas kriteria yang telah dipenuhi oleh Dusun Sade sebagai desa wisata mulai dari keberadaan

atraksi wisata, aksesibilitas, sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, ketersediaan infrastruktur, dan dukungan dari masyarakat desa (Menlh, 2014).

Berbanding halnya dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan sikap sebaliknya. Pemerintah kabupaten sangat minim memberikan perhatian terhadap keberadaan Dusun Sade, terutama dalam bentuk program maupun draf kebijakan yang secara spesifik menjadi upaya pemerintah dalam mempromosikan maupun mendukung keberadaan Dusun Sade sebagai desa wisata. Hal tersebut sesuai hasil wawancara awal peneliti dengan Ferdian selaku perangkat pemerintah daerah (Bappeda Lombok Tengah) pada tanggal 15 Maret 2015 yang membenarkan bahwa masih jarang program maupun kebijakan khusus yang dicanangkan oleh pemerintah terkait kepariwisataan dalam bentuk desa wisata. Pemerintah daerah (baik provinsi atau kabupaten) hanya memfokuskan orientasi promosi pariwisata pada sektor-sektor wisata berbasis bahari dan alam terutama wisata pantai. Sementara itu, Dusun Sade menjadi objek desa wisata paling populer di Pulau Lombok. Data menunjukkan, rata-rata dalam setiap harinya Dusun Sade dikunjungi oleh tak lebih dari 100 orang wisatawan dan meningkat signifikan hingga dua kali lipat pada hari libur (Menlh, 2014).

Seluruh capaian Dusun Sade pada akhirnya telah berhasil menarik minat pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Setelah cukup lama tidak memberikan perhatian serius, pemerintah pada akhirnya mulai menempatkan Dusun Sade pada skala prioritas pembahasan kebijakan. Beberapa instansi terkait terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hingga Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) telah melakukan serangkaian upaya

mendorong munculnya kebijakan spesifik yang akan membantu kemajuan pariwisata di Dusun Sade.

Pada penelitian ini akan muncul sebuah analisis menarik yang bekerja pada dua tingkatan berbeda. Di satu sisi analisis akan memperlihatkan jalan panjang yang ditempuh masyarakat Dusun Sade secara mandiri hingga mampu mengembangkan daerahnya menjadi desa wisata dengan berbagai kekurangan dan kendala yang dihadapi. Di sisi lain analisis akan memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas memberikan dukungan terhadap Dusun Sade di tengah terbatasnya kebijakan spesifik terkait desa wisata. Dua tingkat analisis tersebut sekaligus digunakan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah utama yang diajukan pada penyusunan proposal penelitian ini dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Sade (Studi pada Pemerintah Desa Rembitan Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada di latar belakang di atas, maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata Sade?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata Sade?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata Sade.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata Sade.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ataupun melengkapi kajian serupa yang telah dilakukan terkait pengembangan Desa Wisata.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai data pembanding baik dalam hal studi kasus maupun kerangka teoritik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan baik bagi mahasiswa, lembaga donor maupun partai politik sendiri yang ingin melakukan studi terkait dengan pengembangan desa wisata;
 - b. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi acuan bagi para *stakeholder* di tingkat pusat maupun daerah dalam mengevaluasi peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar rencana penelitian skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab (bagian utama):

BAB I berisis tentang latar belakang penelitian yang merupakan argumen utama mengapa peneliti mengambil tema terkait dengan pengembangan wisata berbasis masyarakat lokal. Selain itu, bab pendahuluan pada skripsi ini akan menjabarkan rumusan masalah serta tujuan serta manfaat yang coba ditawarkan.

BAB II terkait dengan tinjauan pustaka, dimana skripsi ini pada nantinya akan menggunakan kerangka analisis konsep pengembangan wisata. Selain diawali dengan konsep pengembangan wisata berkelanjutan, pada bab II ini untuk lebih spesifik akan menggunakan konsep peran pemerintah daerah yang akan digunakan terutama mengacu pada indikator yang dicetuskan.

BAB III dalam skripsi ini berisi metodologi penelitian, yang antara lain berupa jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini diulas metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu penelitian kualitatif. Pemilihan ini juga berdampak pada jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang dilakukan.

BAB IV merupakan inti penulisan skripsi ini secara garis besar akan terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni pertama menguraikan gambaran profil daerah penelitian. Untuk menggambarkan secara komprehensif terkait daerah penelitian akan disajikan perkembangan awal upaya pengembangan

Dusun Sade menjadi desa wisata. Pada bagian selanjutnya akan melihat peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Dusun Sade. Sedangkan pada bagian akhir bab ini akan menjabarkan faktor pendukung dan penghambat dari peran pemerintah desa dalam mengembangkan Desa Wisata Dusun Sade.

BAB V merupakan catatan peutup merupakan kesimpulan yang dapat diambil setelah menjabarkan analisis panjang. Pada bagian ini akan dipertegas temuan-temuan apa saja yang cukup signifikan dan dijelaskan dalam bentuk poin-poin maupun narasi singkat.